



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) PERUBAHAN TAHUN 2020

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Danau Aji Nomor 99 Telp. (0541) 661281 Fax 664541 Kode Pos 75512

e-mail : diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id

TENGGARONG

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia - Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini merupakan dokumen Perencanaan yang berdasarkan hasil evaluasi yang menyesuaikan dengan perkembangan dan keadaan serta asumsi prioritas Pembangunan.

Dan pada Tahun 2020 ini nantinya menjadi tahun ke empat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2016-2021,

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini.

Demikian dan dengan Izin dan KehendakNya semoga dokumen ini atau dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	12
BAB III. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
BAB IV. PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	06
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, sedangkan RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Dan sebagaimana Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2020 bahwa pelaksanaan RKPD mengalami perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, bahwa hasil evaluasi asumsi pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan dari asumsi awal APBD Tahun 2020. Terkait hal tersebut, maka seluruh Perangkat Daerah diminta segera menyusun Rancangan Perubahan RENJA-PD Tahun 2020 dengan mengacu kepada pedoman penyusunan Rancangan Perubahan RENJA-PD Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD; ayat (2) Rancangan

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; ayat (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di Tahun 2020 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Program kegiatan sampai dengan Triwulan II (dua) tahun 2020;

2. Tujuan

- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan dua tahun 2020.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;

- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan Dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN 2020 TRIWULAN II

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB IV. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan 8 (delapan) Program yang terdiri dari 4 (empat) Program Generik dan 4 (empat) Program Bidang/Teknis dengan total alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.970.519.248,96;

Dalam pelaksanaan ke 8 (delapan) program tersebut terdapat 51 (lima puluh satu) judul Kegiatan diantaranya 24 (dua puluh empat) Kegiatan Generik, dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan di bidang dan terdapat 2 Kegiatan RKA/DPA belum ditanda tangani oleh TAPD karena terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung belanja Barang yang diserahkan masyarakat adapun nama kegiatan tersebut ;

- Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Rp 150.000.000;
- Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif Kemandirian Masyarakat miskin Rp. 200.000.000,-

Sampai dengan Triwulan ke II Realisasi Anggaran sebesar sebesar Rp. 941.124.994,00. atau tercapai sebesar 13,50 % dan bila dilihat dari total baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung maka Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp Rp.16.505.240.046,86. Sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan ke II tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.683.059.379,00 atau mencapai 28,37 %;

Adapun kegiatan yang belum dapat direalisasikan keuangan diantaranya adalah Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sampai sekarang masih dalam proses pelaksanaan, kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor proses pelaksanaan, kegiatan Penataan Arsip Perangkat Daerah proses pelaksanaan, Pengadaan peralatan gedung masih dalam proses pelaksanaan, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor masih dalam proses pelaksanaan, Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur masih dalam proses pelaksanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Website masih dalam proses pelaksanaan, Inventarisasi Asset Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sebagian besar kegiatan terkendala dengan adanya pandemic covid-19 pembatasan pengumpulan berkerumunan, seperti kegiatan pelatihan wirausaha, penyelenggaraan event atau mengikuti event koperasi dan usaha mikro; dan begitu juga dengan Program yang lain secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2019 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan, karena pola pembagian anggaran kas mengikuti pola perimbangan / bagi hasil daerah;

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2020 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara

SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KODE : 02.11.01

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Berjalan (2020)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2020)	
						Target RENJA-PD Tahun (2020)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100.00%	45.80%	45.80%			
1	01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening	60	36	12	5	41.67%	Adanya Kekurangan Pembayaran Tagihan rekening listrik/ Kenaikan tarif rekening Listrik	41	68.33%
2	01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	126	40	34	0	20%		40	31.75%
3	01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2	1	1	0	33.00%		1	50.00%

4	01.006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK/Paket	5	3	1	1	33.33%		4	80.00%
5	01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan	5	3	1	1	100.00%		4	80.00%
6	01.010	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor	3	1	1		20%	Penambahan Pagu Belanja karena keperluan standar kesehatan Covid-19	2	66.67%
7	01.011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kotak Makanan dan Minuman	2,892	1,372	750	160	21.33%		2,122	73.37%
8	01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat kooordinasi dan konsultasi	5	3	1	0	20%	Pergeseran anggaran didalam Rekening	4	80.00%
9	01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	60	36	12	6	50.00%	Penyesuaian, Efisiensi dan adanya tambahan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan	42	70.00%
10	.01.015	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	795	390	186	186	100.00%		576	72.45%
11	01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan	4	0	4	0	20%		4	100.00%
II	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			80%	42.20%	52.75%			
1	02.001	Pengadaan peralatan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor	20	12	4		20%	Penambahan Pagu utk Fasilitas peralatan IT (Kamera dan UPS)	16	80%
2	02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin	4	2	1	1	100.00%		3	75%
3	02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan	60	36	12	6	50.00%		48	80%
4	02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	48	24	12	6	50.00%	Penambahan Pagu Kekurangan Biaya Perbaikan peralatan sarana kantor	36	75%

5	02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	48	24	12	6	50.00%		36	75%
6	02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	95	55	3	0	20.00%	Penambahan Pagu adanya Kekurangan Biaya Sarana Perlengkapan Kantor	58	61%
III	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP			84%	33.00%	39.29%			
1	05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	60	0	30	30	100.00%		30	50%
2	05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	3	1	1	0	20.00%		2	67%
IV	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	80		100%	43.00%	43.00%			
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit;	100		80%	43.00%	53.75%			
			Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	100		80%	43.00%	53.75%			
1	06.009	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah event dan publikasi yang diikuti	10	5	1	1	33.33%	Situasi belum memungkinkan untuk mengikuti even Efisiensi Anggaran dengan menurangi target	6	60%
2	06.019	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	1	1	0	0	0		1	100%
3	06.020	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Update Data Asset	2	1	1		20.00%		1	50%
4	06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	4	5	4	80.00%		9	64%
5	06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	1	0	23.00%		1	50%

6	06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	1	0	23.00%		1	50%
V	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	3.60%		3.28%	22.00%	670.73%			
			Pertumbuhan Usaha Mikro	3.60%							
			% Usaha Mikro Aktif	0.94							
1	16.001	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	Jumlah Sentra UMK yang difasilitasi	18	0	3	0	20%		3	16.67%
2	16.004	Pendataan UMK Tani dan Nelayan	Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan	2	0	1	0	20%		1	50.00%
3	16.005	Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	Jumlah Dokumen	1	0	1	0	20%		1	100.00%
4	16.011	Pendampingan Penerbitan IUMK	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan/ Pertemuan	540	180	180	0	20%		360	66.67%
		Pelatihan wirausaha baru	jumlah wirausaha yang dilati						Tidak dilaksanakan Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan situasi Pandemi		
		Fasilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah event						Tidak dilaksanakan Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan situasi Pandemi		
		Verifikasi dan Evaluasi Bantuan	Jumlah Dokumen						Belum Prioritas dan adanya perubahan Perbup 65 Tahun 2019 tentang hibah		
VI	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	0.3571		33%	25.10%	76.06%			
			Cakupan Bina Koperasi	0.55		25%	25.10%	100.40%			
			Cakupan Bina UMKM	0.3							
1	17.001	Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha	Jumlah fasilitasi kerjasama Koperasi	7	0	7		25%		7	100.00%

		Koperasi									
2	17.003	Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	Jumlah fasilitasi kerjasama permodalan koperasi	16	0	7		25%		7	43.75%
3	17.006	Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	284	0	147		25%		147	51.76%
4	17.007	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	Jumlah Koperasi yang di monev	72	0	15		25%		15	20.83%
5	17.009	Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	33	1	33		26%		33	100.00%
6		Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan untuk usaha jagung						Tidak dilaksanakan Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan		
7		Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata	Jumlah Usaha Mikro yang ditata di Destinasi Pariwisata						Tidak dilaksanakan Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan		
VII	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Melakukan RAT	31.50%		31%	34.10%	110.00%			
			Koperasi Berprestasi	5		5	34.10%	6.82%			
			Cakupan Bina Koperasi	5.26%		4%	34.10%	936.81%			
1	18.001	Pendampingan dan monev RAT Koperasi	Jumlah Pendampingan dan evaluasi	574	408	140	22	15.71%		548.00	95.47%
2	18.002	Fasilitasi Pembubaran Koperasi	Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	180	0	90		20.00%		90.00	50.00%
3	18.006	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Dinilai	167	95	36		20.00%		131.00	78.44%
4	18.009	Pelatihan Pengurus Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	60	0	30		20.00%		30	50.00%
5	18.015	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah fasilitasi	20	0	6	2	33.33%		6.00	30.00%

		Koperasi Petani Jagung	koperasi petani jagung								
6	18.019	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	480	240	90		20.00%		330.00	68.75%
7		Pengusulan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi & Tokoh Penggerak Koperasi	Jumlah Dokumen usulan						Tidak dilaksanakan Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan		
8		Fasilitasi Kegiatan Dekopinda	Cakupan Fasilitasi kegiatan						Jadwal Event sudah lewat pada Situasi keadaan Pandemi Covid - 19		
9		Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kampung KB	Jumlah penataan koperasi dan UKM di kampung KB						Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan pada keadaan Pandemi Covid - 19		
VIII	19	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	1000		5%	27.80%	556.00%			
1	19.002	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	Jumlah yang dilatih	180	0	90	60	66.67%		90	50.00%
2	19.005	Pendataan Wirausaha Baru	Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata	400	0	200		20.00%		200	50.00%
3		Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat						Tidak dilaksanakan dan belum sesuai mekanisme Perbup 65 Tahun 2019		
4		Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif	Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat						Tidak dilaksanakan dan belum sesuai mekanisme Perbup 65 Tahun 2019		

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 4 Program dari 9 Program dengan beberapa Indikator capaian hal ini tentu berpengaruh terhadap capaian kinerja Organisasi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 10 Kegiatan yang berisikan kegiatan rutin Perkantoran pada setiap Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaiannya sebesar 91,04%

2. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 6 Kegiatan yang berisikan kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor sampai dengan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, capaiannya rata-rata 100%;

3. Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 3 Kegiatan yang berisikan Publikasi Kinerja Pembangunan Koperasi dan UKM Pada / Event Pembangunan Daerah, Pendampingan Gender, dan Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM dengan capaian rata-rata sebesar 74,36%

4. Cakupan Bina Koperasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ada 4 Kegiatan yang berisikan kegiatan Pengembangan UKM Center Kec. Muara Badak, Pelatihan Peningkatan Usaha Kecil (UMKM), Bantuan Modal untuk Koperasi Kelurahan, Pelatihan Pengurus Koperasi dengan capaian rata-rata Program 90,65%:

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartaengara

NO	INDIKATOR	SPM / standar nasional	I K K	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Persentase Koperasi Aktif		Persentase Koperasi Aktif	81,03%	81,13%	81,23%	81,42%	81,50%		81,30%	81,23%	81,42%	81,50%	
2.	Persentase Usaha Mikro Aktif		Persentase Usaha Mikro Aktif	n/a	n/a	94,14%	94,14%	94,14%		94,14%	94,14%	94,14%	94,14%	
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN			2%	2%	2%	2%	2%	96,55%	100%	97,56%	100%	100%	
	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP			84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	
	Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
2	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru			n/a	n/a	280	300	5000	n/a	n/a	160	300	500	Adanya Perubahan % ke Angka Absolut
3	Koperasi Melakukan RAT			28,46%	29,16%	30,50%	31,00%	31,50%	28,46%	29,16%	30,50%	31,00%	31,50%	
	Cakupan Koperasi Berprestasi			n/a	5%	5%	5%	5%	n/a	5%	5%	5%	5%	
	Cakupan Bina Koperasi			n/a	2,89%	3,13%	3,64%	5,26%	n/a	2,89%	3,13%	3,64%	5,26%	
	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi			25%	28%	31%	33%	35%	25%	28%	31%	33%	35%	
	Cakupan Bina UMKM			11%	15%	20%	25%	30%	11%	15%	20%	25%	30%	
	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil			2,89%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	2,89%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	
	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro			2,89%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	2,89%	2,84%	3,06%	3,28%	3,60%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Pada perumusan Program dan Kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terutama Misi :

Misi 1 “Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat “

MISI 2 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten”

MISI 4 “Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah”

Berdasarkan hal tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, *Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator kinerja : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;*
2. Sasaran Kedua, *Meningkatnya Wirausaha Baru Indikator Kinerja : Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru,*
3. Sasaran Ketiga, *Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi. Indikator Kinerja : Pertumbuhan Koperasi Aktif.*
4. Sasaran Keempat, *Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro. Indikator Kinerja : Persentase UMKM yang Naik Kelas*

Adapun catatan penting atas perumusan perubahan anggaran sebagai berikut :

Program Penunjang Generik :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertambah karena adanya kenaikan pembayaran rekening listrik;
- 2) Penyediaan bahan logistik kantor, bertambah karena Belanja keperluan standar kesehatan Covid-19;
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran ; Penyesuaian, Efisiensi dan adanya tambahan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan;
- 4) Pengadaan peralatan gedung ; Penambahan Pagu untuk Penguatan Fasilitas peralatan IT (Kamera dan UPS) untuk zoom meet;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ; Penambahan Pagu Kekurangan Biaya Perbaikan kondisi peralatan sarana kantor;
- 6) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dilakukan perubahan jumlah unit dan harga satuan pengadaan kursi tidak sesuai dengan harga pasaran;
- 7) Publikasi Perencanaan Pembangunan dilakukan pengurangan adanya efisiensi anggaran;

- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev dilakukan pengurangan adanya efisiensi anggaran;

Program Urusan Koperasi dan UKM :

- 1) Pelatihan wirausaha baru , ; tidak dilaksanakan Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan situasi Pandemi;
- 2) Fasilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro; Tidak dilaksanakan Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan situasi Pandemi
- 3) Verifikasi dan Evaluasi Bantuan tidak dilaksanakan; Tidak dilaksanakan Belum Prioritas dan adanya perubahan Perbup 65 Tahun 2019 tentang hibah;
- 4) Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi Koperasi tidak dilaksanakan;
- 5) Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata; Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan;
- 6) Pengusulan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi & Tokoh Penggerak Koperasi tidak dilaksanakan dan dilakukan perubahan;
- 7) Fasilitasi Kegiatan Dekopinda ; Tidak dilaksanakan karena Jadwal Event sudah lewat pada Situasi keadaan Pandemi Covid – 19;
- 8) Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kampung KB; Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan pada keadaan Pandemi Covid – 19
- 9) Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha tidak dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme Perbup tentang Hibah dan Bansos;
- 10) Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif tidak dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme Perbup tentang Hibah dan Bansos;

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE : 2.11.01.01

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		2.002.456.248,96	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.803.134.198,00	-198.188.051,96	100%	1.852.201.623
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening	12 Bulan (4 Rek)	DKUKM	121.000.000,00	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening	12 Bulan (4 Rek)	DKUKM	133.278.695,00	-12.278.695,00	12	121.000.000
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan (17 unit motor 6 unit mobil)	DKUKM	13.650.000,00	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan (17 unit motor 6 unit mobil)	DKUKM	13.650.000,00	0,00	34	13.395.375
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket/ Tahun	DKUKM	140.000.000,00	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket/ Tahun	DKUKM	140.000.000,00	0,00	1	140.000.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK/Paket	1 Paket	DKUKM	70.000.000,00	Jumlah ATK/Paket	1 Paket	DKUKM	70.000.000,00	0,00	1	70.000.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan	1 Paket/thn	DKUKM	50.000.000,00	Jumlah cetak dan Penggandaan	1 Paket/thn	DKUKM	50.000.000,00	0,00	1	50.000.000
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor	1 unit/pkt	DKUKM	10.000.000,00	Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor	1 unit/pkt	DKUKM	20.000.000,00	10.000.000,00	1	10.000.000
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kotak Makanan dan Minuman	3 Paket/jenis (800 Porsi)	DKUKM	40.000.000,00	Jumlah Kotak Makanan dan Minuman	3 Paket/jenis (800 Porsi)	DKUKM	40.000.000,00	0,00	800	40.000.000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	1 pkt/thn (210 OH)	DKUKM	359.080.000,00	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	1 pkt/thn (210 OH)	DKUKM	359.080.000,00	0,00	1	359.080.000
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	186 lembar	DKUKM	1.200.000,00	Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia	186 lembar	DKUKM	1.200.000,00	0,00	200	1.200.000
10	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan	4 Paket	DKUKM	250.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan	4 Paket	DKUKM	250.000.000,00	0,00	1	100.000.000

11	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	12 Bulan (44 Orang)	DKUKM	947.526.248,96	Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor	12 Bulan (44 Orang)	DKUKM	727.059.502,00	-220.466.746,96	225	947.526.248
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	80%		358.170.000,00	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	80%		620.211.651,00	262.041.651,00	80%	358.170.000,00
1	Pengadaan peralatan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor	1.0 Jenis	DKUKM	54.370.000,00	Jumlah peralatan gedung kantor	1.0 Jenis (4 unit)	DKUKM	120.263.800,00	65.893.800,00	2	54.370.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin	1.0 paket/thn	DKUKM	125.000.000,00	Jumlah Pemeliharaan Rutin	1.0 paket/thn	DKUKM	125.000.000,00	0,00	3	125.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan	12.0 bulan	DKUKM	118.800.000,00	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan	12.0 bulan (23 unit)	DKUKM	118.800.000,00	0,00	2	118.800.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	3.0 paket/thn	DKUKM	15.000.000,00	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	3.0 paket/thn	DKUKM	70.000.000,00	55.000.000,00	33	15.000.000
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2.0 paket/thn	DKUKM	45.000.000,00	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2.0 paket/thn	DKUKM	186.147.851,00	141.147.851,00	5	45.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84%		100.000.000,00	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84%		100.000.000,00	0,00	84%	100.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	30 Orang	DKUKM	50.000.000,00	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	0	DKUKM	50.000.000,00	0,00	30	50.000.000
2	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	1 Inovasi	DKUKM	50.000.000,00	Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB	1 Inovasi	DKUKM	50.000.000,00	0,00	1	50.000.000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	100%		727.083.000,00	Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset	100%		605.601.200,00	-121.481.800,00	100%	727.083.000,00
		Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	80%			Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	80%				80%	
1	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah event dan publikasi yang diikuti	3 Event	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Jumlah event dan publikasi yang diikuti	3 Event	Kab. Kutai Kartanegara	78.518.200,00	-121.481.800,00	3	200.000.000
2	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	1 Unit	DKUKM	30.000.000,00	Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola	1 Unit	DKUKM	30.000.000,00	0,00	1	30.000.000
3	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Update Data Asset	1 Dokumen	DKUKM	21.783.000,00	Jumlah Laporan Update Data Asset	1 Dokumen	DKUKM	21.783.000,00	0,00	1	21.783.000
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	DKUKM	190.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	DKUKM	190.000.000,00	0,00	5	190.000.000
5	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DKUKM	191.373.800,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DKUKM	191.373.800,00	0,00	1	191.373.800
6	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DKUKM	93.926.200,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DKUKM	93.926.200,00	0,00	1	93.926.200
V	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	3,28%		1.077.810.000,00	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	3,28%		452.810.000,00	-625.000.000,00	3,28%	777.810.000,00
1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	Jumlah Sentra UMK yang difasilitasi	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	85.000.000,00	Jumlah Sentra UMK yang difasilitasi	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	85.000.000,00	0,00	3	85.000.000

2	Fasilitasi Pembubaran Koperasi	Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	90 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	90.000.000,00	Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	90 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	90.000.000,00	0,00	90	90.000.000
3	Pengusulan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi & Tokoh Penggerak Koperasi	Jumlah Dokumen usulan	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	Jumlah Dokumen usulan	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-50.000.000,00	4	50.000.000
4	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diawasil dan Dinilai	36 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah Koperasi yang Diawasil dan Dinilai	36 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	0,00	36	150.000.000
5	Pelatihan Pengurus Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	30 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	30 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	0,00	30	50.000.000
6	Fasilitasi Kegiatan Dekopinda	Cakupan Fasilitasi kegiatan	2 Event	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	Cakupan Fasilitasi kegiatan	2 Event	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-50.000.000,00	2	50.000.000
7	Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kampung KB	Jumlah penataan koperasi dan UKM di kampung KB	6 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	Jumlah penataan koperasi dan UKM di kampung KB	6 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-50.000.000,00	6	50.000.000
8	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung	Jumlah fasilitasi koperasi petani jagung	6 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	Jumlah fasilitasi koperasi petani jagung	6 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	0,00	6	75.000.000
9	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	90 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	90 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	0,00	90	150.000.000
VIII	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi (Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru)	5%		700.000.000,00	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi (Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru)	5%		350.000.000,00	-350.000.000,00	5%	750.000.000,00
1	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	Jumlah sarana dan prasarana usaha	50 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana usaha	0	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-150.000.000,00	150	300.000.000
2	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	Jumlah yang dilatih	90 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah yang dilatih	90 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	0,00	150	250.000.000
3	Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif	Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat	30 Kelompok	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat	0	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-200.000.000,00	0	-
4	Pendataan Wirausaha Baru	Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata	200 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata	200 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	0,00	200	200.000.000
JUMLAH					6.970.519.248,96				5.562.891.048,00	(1.407.628.200,96)		6.551.470.720,00

2	Pelatihan wirausaha baru	Jumlah wirausaha yang dilatih	60 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	Jumlah wirausaha yang dilatih	60 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-75.000.000,00	60	75.000.000
3	Pendaftaran UMK Tani dan Nelayan	Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	67.810.000,00	Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	67.810.000,00	0,00	1	67.810.000
4	Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	0,00	0	.
5	Facilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Event	4 event	Kab. Kutai Kartanegara	450.000.000,00	Jumlah Event	4 event	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-450.000.000,00	3	300.000.000
6	Pendampingan Penerbitan IUMK	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan/ Pertemuan	180 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan/ Pertemuan	180 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	0,00	180	150.000.000
7	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-100.000.000,00	1	100.000.000
VI	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	33%		1.115.000.000,00	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	33%		890.000.000,00	-225.000.000,00	33%	1.096.206.097,00
		Cakupan Bina UMKM	25%			Cakupan Bina UMKM	25%				25%	
1	Facilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	Jumlah fasilitas kerjasama Koperasi	7 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	115.000.000,00	Jumlah fasilitas kerjasama Koperasi	7 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	115.000.000,00	0,00	7	115.000.000
2	Facilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	Jumlah fasilitas kerjasama permodalan koperasi	7 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	115.000.000,00	Jumlah fasilitas kerjasama permodalan koperasi	7 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	115.000.000,00	0,00	7	115.000.000
3	Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan untuk usaha jagung	6 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	Jumlah Koperasi yang dikembangkan untuk usaha jagung	6 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-75.000.000,00	6	75.000.000
4	Facilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	Jumlah fasilitas LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	50 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	485.000.000,00	Jumlah fasilitas LPD menjadi KSP/USP-Koperasi	50 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	485.000.000,00	0,00	50	485.000.000
5	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	Jumlah Koperasi yang di movev	15 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	Jumlah Koperasi yang di movev	15 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	0,00	15	75.000.000
6	Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	36 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih	36 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	0,00	36	100.000.000
7	Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata	Jumlah Usaha Mikro yang ditata di Destinasi Pariwisata	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah Usaha Mikro yang ditata di Destinasi Pariwisata	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	0,00	-150.000.000,00	1	131.206.097
VII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Melakukan RAT	31%		890.000.000,00	Koperasi Melakukan RAT	31%		740.000.000,00	-150.000.000,00	31%	890.000.000,00
		Cakupan Bina Koperasi	3,64%			Cakupan Bina Koperasi	3,64%				3,64%	
		Koperasi Berprestasi	5%			Koperasi Berprestasi	5%				5%	
1	Pendampingan dan movev RAT Koperasi	Jumlah Pendampingan dan evaluasi	140 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	225.000.000,00	Jumlah Pendampingan dan evaluasi	140 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	225.000.000,00	0,00	140	225.000.000

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM dibuat yang berdasarkan dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2020 dan hasil pembahasan dan verifikasi bersama Tim dari Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini merupakan penjabaran/turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan tahun 2020 dengan melihat hasil evaluasi sampai dengan Triwulan ke II tahun 2020 pada pelaksanaan Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah dan juga adanya asumsi pendapatan Tahun 2020 yang mengalami penurunan dari asumsi awal APBD Tahun 2020.

Akhir kata apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini akan kami lakukan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kritik dan saran sangat kami harapkan, terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak;

Tenggarong, 15 September 2020
Kepala Dinas

Dr. TAJUDDIN
196404051986031036